

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN LEMBAGA  
SWADAYA MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN  
KONTROL SOSIAL TERHADAP PEMBANGUNAN  
FISIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**(Studi di LSM Kompak Lampung Kec. Kalianda Lampung Selatan)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:**

**RIKY FARENZA  
NPM : 1321020149**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 secara umum organisasi kemasyarakatan diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Pada perkembangannya di Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada saat ini banyak muncul Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi melalui perkumpulan yang dibentuk oleh individu atau masyarakat untuk menjalankan peran dalam mengawal berbagai kebijakan dan pembangunan di Daerah Lampung Selatan. Permasalahan dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana peran LSM dalam melaksanakan kontrol sosial terhadap pembangunan fisik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan. Dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran LSM dalam melaksanakan kontrol sosial terhadap pembangunan fisik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan, dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara, dan dilengkapi oleh data sekunder melalui buku-buku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang data hasil penelitiannya lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan pada saat penelitian. Berdasarkan hasil penelitian peran Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai kontrol sosial di Kabupaten Lampung Selatan adalah melakukan dan melihat kebijakan dalam pelaksanaan program-program yang ada di Pemerintahan Lampung Selatan, melakukan pemantauan anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Lampung Selatan, melakukan pengawasan terhadap program pembangunan dan bertindak sebagai mitra pemerintah dalam mengawasi pengerjaan suatu proyek yang dikerjakan pihak rekanan. Adapun menurut Hukum Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dikerjakan dalam rangka untuk menegakkan kebenaran dengan dasar *Amar ma'ruf nahi mungkar* berdasarkan ajaran yang islami.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telepon. (0721) 703260 Kode pos 35131*

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi dengan nama:

**Nama : Riky Farenza**

**NPM : 1321020149**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN KONTROL SOSIAL TERHADAP PEMBANGUNAN FISIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (Studi di LSM Kompak Lampung Kec. Kalianda Lampung Selatan)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197304142000032002**

**Pembimbing II**

**Eti Karini, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197308162003122003**

**Ketua Jurusan**

**Frenki M.Si.**

**NIP. 198003152009011002**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let.Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telepon. (0721) 703260 Kode pos 35131*

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN KONTROL SOSIAL TERHADAP PEMBANGUNAN FISIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**(Studi di LSM Kompak Lampung Kec. Kalianda Lampung Selatan)”,**  
disusun oleh : **Riky Farenza dengan NPM.1321020149 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah).** Telah di Ujikan dalam sidang Munagasyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : Rabu/30 Desember 2020.

**Tim Penguji**

**Ketua Sidang : Dr. H. Jayusman, M.Ag.**

**Sekretaris : Anis Sofiana, M.Si.**

**Penguji I : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom. I.**

**Penguji II : Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.**

**Penguji III : Eti Karini, S.H., M.Hum.**

**Dekan,**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.**

**NIP.196210221993031002**





## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”

(Q.S. An-Nisa : 58)



## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT penulis persembahkan skripsi sederhana ini sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda tercinta, Zahidin terima kasih karena telah rela berjalan jauh demi menafkahi keluarga serta telah membimbing akhlak yang mulia sebagai manusia. Dan Ibunda tersayang, Syarifah Maisaroh terima kasih karena beliau telah berhasil mendidik penulis dengan penuh kasih sayang yang tiada putus dan yang selalu mendo'akan anak-anaknya serta mengingat penulis kepada Tuhan.
2. Adik kandung Fiqi Nur'adha Rianza, Letti Purnama Za yang selalu memberikan canda tawa serta dukungan penuh disela-sela aktivitas padat penulis. Semoga Tuhan memberikan hal-hal yang bermanfaat kepada kalian semua, sehingga tidak lupa apa yang pernah kita diskusikan bersama.
3. Seluruh saudara dekat yang telah memberikan doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung di mana tempat penulis menuntut ilmu.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Maja Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Pada Tanggal 31 Januari 1994, dengan nama lengkap **“Riky Farenza”** anak pertama dari pasangan Bapak **Zahidin** dan Ibu **Syarifah Maisaroh**. Berikut adalah daftar riwayat hidup penulis:

1. MI.TPI PERKEMAS selesai Tahun 2007.
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Kalianda selesai Tahun 2010.
3. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kalianda lulus tahun 2013.
4. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syari’ah.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Seraya memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan dan kesehatan, alhamdulillah telah dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Melaksanakan Kontrol Sosial Terhadap Pembangunan Fisik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan “. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir jaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Program S1 Jurusan Syariah Syarifiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Patut disadari dalam penulisan Skripsi ini banyak mendapat bantuan dari semua pihak yang dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati disertai rasa tanggung jawab penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



3. Bapak Frenki. M.Si., selaku ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I yang banyak memberikan saran, arahan dan motivasi serta meluangkan waktu dalam penulisan Skripsi ini.
5. Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan saran, arahan, semangat sekaligus motivasi serta meluangkan waktu dalam penulisan Skripsi ini.
6. Seluruh Dosen, Staf dan Sekretaris Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Segenap pengurus Lembaga Kompak Lampung yang telah mau memberikan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
8. Sahabat KKN yaitu Sahabat seperjuangan terima kasih atas ilmu yang didapat dari kalian.
9. Terimakasih banyak untuk Fresti Prihatini yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan sahabat-sahabat seperjuangan khususnya Siyasah Kelas A Fakultas Syari'ah yang selalu memberikan semangat dan informasi dalam menyelesaikan perkuliahan.

Disadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan dan kekurangan kemampuan serta waktu yang dimiliki, untuk itu kiranya pembaca dapat memberikan saran dan masukan guna melengkapi tulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak dalam penulisan skripsi ini dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung,  
Penulis

2020



**Riky Farenza**  
**NPM. 1321020149**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	8
E. Rumusan Masalah .....	9
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
G. Signifikasi Penelitian.....	10
H. Metode Penelitian.....	10

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Kajian Teori.....	16
1. Konsep Amar Ma'ruf Nahi Mungkar .....	16
2. Tinjauan tentang Lembaga Swadaya Masyarakat .....	20
3. Fungsi tujuan dan peran Lembaga Swadaya Masyarakat.....	24
4. Tipe-tipe Lembaga Swadaya Masyarakat .....	34
5. Pembangunan .....	41
B. Tinjauan Pustaka .....	44

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
1. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Selatan .....	46
2. Gambaran Umum Lembaga Kompak Lampung.....	47
B. Peran Lembaga Kompak Lampung Dalam melaksanakan kontrol sosial.....	64

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Bagaimana peran LSM dalam melaksanakan kontrol social Terhadap pembangunan fisik di lingkungan pemerintah kabupaten Lampung Selatan .....	67
--	----

B. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat .....	72
--	----

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	76
B. Rekomendasi .....	77

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebagai langkah awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Melaksanakan Kontrol Sosial Terhadap Pembangunan Fisik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan”**. Dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka secara ringkas penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalam judul skripsi ini. Adapun beberapa istilah yang perlu diberi penjelasan adalah sebagai berikut :

Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: “Hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).<sup>1</sup>

Hukum Islam adalah perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (*taqrir*). Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah.

---

<sup>1</sup> <http://kbbi.web.id/tinjau>, diakses tanggal 20 November 2017, jam 20:00 WIB

Peran menurut kamus ilmiah adalah hal yang berlaku/bertindak.<sup>2</sup>

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah salah satu Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh masyarakat berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. LSM merupakan lembaga/organisasi non partisan yang berbasis pada gerakan moral (moral force) yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik.<sup>3</sup>

Kontrol Sosial adalah mengontrol psikologis dan non-fisik karena merupakan “tekanan mental” terhadap individu sehingga individu akan bersikap dan bertindak sesuai dengan penilaian dalam kelompok”.<sup>4</sup>

Pembangunan Fisik adalah perwujudan nyata dari pembangunan segi-segi non fisik yang meliputi sosial budaya, sosial ekonomi dan sebagainya maupun pembangunan yang meliputi sarana dan juga prasarana pemerintahan seperti: jalan, jembatan, pasar, pertanian dan irigasi.<sup>5</sup>

Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, atau urusan dari badan yang memerintah dalam urusan negara yang menentukan keputusan dan kebijakan lain.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : Arkola, 2001), hlm. 586

<sup>3</sup> Budi Setiyono, Pengawasan Pemilu oleh LSM, Suara merdeka, 20 November 2017

<sup>4</sup> <http://www.gurupendidikan.co.id> di akses 20 November 2017, jam 15:00 WIB

<sup>5</sup> <http://www.trigonalmedia.com> di akses 20 November 2017, jam 15:0 WIB

<sup>6</sup> Inu Kencana Syafi'i, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 4



## B. Alasan memilih judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya sebagai berikut :

### 1. Alasan Objektif

- a. LSM adalah salah satu organisasi non pemerintah yang fungsinya adalah membantu dan mengoreksi jalanya roda pemerintahan, tapi hanya sedikit dari masyarakat yang tahu akan tugas dan fungsinya, untuk itu penulis akan mencoba mengeksplor itu semua.
- b. Banyak anggapan miring tentang beberapa LSM yang ada di tengah masyarakat, untuk itu penulis mencoba menjelaskan masalah di atas

### 2. Alasan Subjektif

Ditinjau dari aspek bahasan judul skripsi ini, permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji secara mendalam, serta di samping itu juga ada relevansinya dengan disiplin ilmu yang di pelajari.

## C. Latar Belakang Masalah

Menurut data dari Badan Pusat Statistika menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di pedesaan Indonesia berjumlah 17,77 juta pada Maret 2014.<sup>7</sup> Untuk itu pemerintah dengan berbagai kebijakannya berupaya melakukan pembangunan pedesaan untuk memberdayakan masyarakat pedesaan agar dapat memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih

---

<sup>7</sup> Data Badan Pusat Statistik diakses pada tanggal 21 November 2017 dapat diunduh dari <http://www.beritasatu.com/nasional/193810-bps-maret-2014-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-capai-28-juta.html>

baik secara seimbang. Namun upaya tersebut belum dapat sepenuhnya memenuhi sasaran karena program-program yang diberikan belum dapat menyentuh masyarakat miskin.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sering disebut juga dengan *Non Government Organization* (NGO),<sup>8</sup> atau organisasi non pemerintah yang saat ini keberadaanya sangat mewarnai kehidupan politik di Indonesia. Diperkirakan saat ini lebih dari 10.000 LSM beroperasi di Indonesia baik ditingkat nasional, provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota, dimana dari tahun ketahun jumlah ini semakin bertambah.<sup>9</sup> Perkembangan politik, demokrasi, pembangunan ekonomi dan kemajuan teknologi informasi merupakan faktor-faktor yang mendorong terus bertambahnya jumlah LSM di Indonesia. Bergulirnya era reformasi menggantikan era orde baru diikuti pula dengan peningkatan jumlah LSM. Jika pada tahun 1997 ditaksir ada sekitar 4000-7000 LSM, maka pada tahun 2002 jumlah LSM menurut Departemen Dalam Negeri menjadi sekitar 13.500 LSM.

Dikalangan masyarakat, LSM telah tumbuh dan berkembang sebagai tempat berhimpunnya anggota masyarakat yang peduli dan secara sukarela mengabdikan dirinya untuk membantu pemerintah melakukan pembangunan. Istilah LSM tersebut pertama kali dikenal dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bergerak dalam hal-hal yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup.

---

<sup>8</sup> Pada penulisan selanjutnya penulis akan menggunakan istilah LSM

<sup>9</sup> Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta : LP3ES, 1999), hlm. 6

Alah SWT berfirman dalam Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Hasyr 59:18).<sup>10</sup>

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Q.S. Ali'imran: 110).

Dalam sebuah hadits Rosulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ الْمُرِّيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالْأَمِيرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ إِنْ نَسِيَ ذِكْرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ إِنْ نَسِيَ لَمْ يَذْكُرْهُ وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعْنَهُ

Artinya: 'Aisyah r.a. berkata Rasulullah SAW bersabda: jika Allah menghendaki kebaikan terhadap seorang raja, maka diberinya

<sup>10</sup> (Q.S. Al-Hasyr : 59:18), hlm. 545



*seorang menteri yang jujur, jika lupa diingatkan, dan jika ingat dibantu. Dan jika Allah menghendaki sebaliknya dari itu, maka Allah memberi padanya, menteri yang tidak jujur, hingga jika lupa tidak diingatkan dan jika ingat tidak dibantu. (H.R. abu dawud).<sup>11</sup>*

Seorang pemimpin pasti mengemban segudang tugas dan amanat yang begitu berat yang harus dijalankan. Sementara untuk melaksanakan semua tugas itu tidak mungkin dia sendiri melakukannya. Oleh sebab itu dibutuhkan sejumlah pembantu untuk meringankan tugas sang pemimpin. Dalam kehidupan politik modern, para pembantu presiden itu bisa disebut sebagai menteri. Dan barangkali bukan hanya presiden, semua jabatan publik di negeri ini, baik bupati, gubernur, wali kota, DPR, hingga kepala sekolah pun, juga membutuhkan pembantu atau pendamping ahli yang bisa meringankan tugas-tugasnya. Sehingga dalam konteks Indonesia, kita tidak hanya mengenal menteri sebagai pembantu presiden, melainkan juga terdapat apa yang kita kenal sebagai juru bicara, asisten ahli, staf ahli, penasihat ahli, termasuk juga LSM.

Dalam konteks ini keberadaan LSM tentunya perlu kita apresiasi dengan baik, karena mereka membantu tugas-tugas kepresidenan. Namun dalam perkembangannya saat ini, LSM tersebut mempunyai lingkup kegiatan yang tidak terbatas pada lingkungan hidup saja, melainkan juga mencakup bidang yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat baik rohani maupun jasmani. Sebagian besar LSM bekerja untuk melayani masyarakat kecil dengan memperkuat kemampuan mereka. Namun terdapat

---

<sup>11</sup><https://islamilogic.wordpress.com/kumpulan-hadits-shahih/40-hadits-tentang-pemimpin-dan-penjasanya/>, diakses 21 November 2017, jam 19:00 WIB

juga LSM yang mengkhususkan kegiatan-kegiatannya untuk memperjuangkan kebijakan yang menguntungkan masyarakat bawah dan untuk menjembatani berbagai sektor. Saat ini bidang kegiatan LSM meliputi bidang-bidang lingkungan hidup, kontrol sosial, konsumen, bantuan hukum, pendidikan dan latihan, perhutanan sosial, pengairan, koperasi, penerbitan, kesehatan dan keluarga berencana, dan pengembangan pedesaan dan pertanian dan lain-lain.

Pada perkembangannya LSM di kabupaten Lampung Selatan pada saat ini banyak muncul LSM sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi melalui perkumpulan yang dibentuk oleh individu atau masyarakat untuk menjalankan peran dalam mengawal berbagai kebijakan dan pembangunan di Kabupaten Lampung selatan.

Di Kabupaten Lampung Selatan sendiri terdapat 197 (seratus sembilan puluh tujuh) LSM yang diketahui berdasarkan data yang diperoleh dari badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Selatan dengan rincian 81 (delapan puluh satu) LSM yang telah terdaftar, 63 (enam puluh tiga) LSM yang belum terdaftar, 4 (empat) LSM yang berbadan hukum, 35 (tiga puluh lima) telah terdaftar namun belum perpanjang SKT, 9 (sembilan) organisasi pemerintahan dan 5 (lima) berdiri sebelum kemerdekaan Tahun 1945.<sup>12</sup>

Tanpa adanya pemantauan yang efektif dari masyarakat maka berbagai kebijakan dan pembangunan dapat terlampaui oleh kepentingan-kepentingan lain, adanya partisipasi masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat tersebut dalam pembangunan akan menghasilkan wujud yang berbeda jika

---

<sup>12</sup> Lampung.tribunnews.com/2013/07/11/, diakses 11 Januari 2018, jam 23:00 WIB

pembangunan tidak melalui proses yang partisipatif, pembangunan yang partisipatif menghasilkan tata pemerintahan yang lebih baik, kemakmuran yang lebih adil, pelayanan dasar yang lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak, akses pembangunan yang lebih merata, organisasi masyarakat yang lebih kuat, dan kebebasan memilih yang terbuka.

Permasalahan utama yang sangat mendasar dalam hal pemberdayaan masyarakat oleh lembaga swadaya masyarakat adalah stigma yang tumbuh disebagian dibenak masyarakat yang masih menaruh curiga terhadap kehadiran dan aktivitas dari lembaga swadaya masyarakat, selama ini banyak sekali lembaga swadaya masyarakat yang sangat lemah dalam mengadopsi sistem manajemen modern, ketergantungannya pada pola-pola hubungan patron-client dan dalam sumber daya manusia, lembaga swadaya masyarakat masyarakat di Indonesia dalam praktiknya juga masih terkungkung dalam wacana pembangunan yang tidak kritis terhadap masalah-masalah ketimpangan struktural dan kelangkaan partisipasi, berdasarkan hal itu seharusnya lembaga swadaya masyarakat sebagai lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat merupakan kontrol sosial yang efektif yang mempunyai peran perkembangan pembangunan dan tatanan kehidupan berdemokrasi.

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah memfokuskan pada upaya terhadap peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan kontrol sosial terhadap pembangunan fisik dilingkungan pemerintahan Kabupaten



Lampung Selatan. Sehingga dalam pembangunannya dapat berjalan dengan efektif dengan adanya pengawasan dari organisasi masyarakat.

#### **E. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas dapat penulis rumuskan beberapa permasalahan :

1. Bagaimana peran LSM dalam melaksanakan kontrol sosial terhadap pembangunan fisik di lingkungan pemerintahan kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat?

#### **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini :

- a. Untuk mengetahui peran LSM dalam melaksanakan kontrol sosial terhadap pembangunan fisik di lingkungan pemerintahan kabupaten Lampung Selatan.
- b. Serta untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan akan seluk beluk LSM selain itu juga bisa dijadikan rujukan bagi penulis selanjutnya untuk disempurnakan.
- b. Manfaat bagi penulis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai media untuk mengaplikasikan ilmu yang dipelajari di sekolah untuk menambah pengalaman di bidang penelitian.
- c. Manfaat bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan bagi pembaca dan pihak lain sebagai bahan informasi serta rujukan untuk penelitian berikutnya.

## G. Signifikasi Penelitian

Pentingnya dalam melakukan penelitian ini adalah agar masyarakat Kabupaten Lampung Selatan dapat melakukan kontrol terhadap setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini (PEMDA Kabupaten Lampung Selatan). Sehingga apa yang di cita-citakan untuk kemajuan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tatacara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.

### 1. Jenis Penelitian dan sifat penelitian

- a. Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang

sebenarnya. dengan berdialog atau wawancara dengan objek penelitian.<sup>13</sup> Penelitian ini meneliti kondisi objek di lapangan tentang LSM di Lampung Selatan.

- b. Sifat Penelitian ini bersifat penelitian Inferensial yaitu “pada jenis penelitian ini penulis tidak hanya melukiskan suatu peristiwa saja, akan tetapi mengambil kesimpulan umum dari masalah yang tengah di bahas.<sup>14</sup>

Berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.

## 2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari penelitian, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna melakukan observasi dan wawancara untuk mendapatkan data secara langsung dari LSM dan masyarakat sebagai saksi mata di Lampung Selatan.

---

<sup>13</sup> Susiadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pusat penelitian dan penerbitan LP2M, 2015) hlm. 10

<sup>14</sup> Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta : Sumbangsih, 1975), hlm. 2



b. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diberikan kepada peneliti yang mana informasi tersebut berasal dari orang yang secara tidak langsung mengamati objek yang diteliti, dalam hal ini yang menjadi sumber data sekundernya adalah

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Metode observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara teliti dan sistematis atas gejala-gejala ( fenomena ) yang sedang diteliti.<sup>15</sup> Berdasarkan jenisnya observasi dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

- 1) Observasi langsung, yaitu observasi yang dilakukan dimana observer berada bersama objek yang diteliti.
- 2) Observasi tidak langsung, yaitu observasi atau pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya yang akan diteliti, misalnya dilakukan melalui flom, rangkaian slide atau rangkaian foto.

Dalam prakteknya, penulis menggunakan metode observasi tidak langsung. Metode observasi penulis gunakan untuk membuktikan data yang diperoleh selama penelitian dengan menerapkan metode observasi *non partisipan*, dimana penulis berlaku sebagai pengamat. Penulis menggunakan metode ini sebagai metode pelengkap, yaitu untuk

---

<sup>15</sup> Arsyat Soeratmo, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP STIM KPN, 2008), hlm.84.

membuktikan kebenaran data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan.

b. Metode interview

Interview atau *wawancara*, adalah suatu prose tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar suaranya dengan suaranya sendiri.<sup>16</sup> Penulis melakukan wawancara terhadap anggota LSM dan juga masyarakat daerah setempat.

Dengan melakukan wawancara dapat memudahkan peneliti dalam menginterpretasi realita yang masih tersimpan di balik data. Karena penelitian ini berbentuk penelitian lapangan, maka wawancara adalah hal yang harus dilakukan untuk memperoleh data atau pencarian informasi kemudian dibantu oleh data sekunder yang mendukung.

c. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan dokumen lainnya.<sup>17</sup> Metode ini digunakan sebagai pengumpulan data mengenai objek lokasi penelitian yaitu Analisis Hukum Islam terhadap peran LSM dalam melaksanakan kontrol sosial terhadap pembangunan fisik lingkungan pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan.

---

<sup>16</sup> P. Joko, Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Peraktek*, (Jakarta : PT, rineka cipta, 2004), hlm.102.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.106.

#### 4. Metode Pengolah Data

Data yang terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data yaitu merapihkan dan menganalisis data tersebut. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan data dengan cara menentukan kelengkapan data yang diperoleh, penandaan dan penyusunan sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), dilakukan untuk menentukan kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Penandaan data (*coding*), dilakukan dengan cara mengelompokan data sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas agar memudahkan dalam menganalisis.
- c. Penyusunan data dalam sistematis (*reconstruction*), dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada setiap permasalahan secara sistematis.<sup>18</sup>

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu “menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum”<sup>19</sup>. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 202

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 112



kseimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Konsep Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

Pandangan hukum Islam terhadap lembaga swadaya masyarakat merupakan tuntutan yang diturunkan Allah termasuk kedalam Amar ma'ruf nahi mungkar yang berupa berita (*akhbar*) dan ada juga berupa tuntutan (*insya*), *akhbar* disini menyangkut zatnya, mahluknya, seperti tauhidullah dan kisah-kisah yang mengandung janji baik dan buruk (*wa'ad dan wa'iid*), adapun *insya* adalah perintah (*amr*), larangan (*nahi*) dan pembolean (*ibadah*).<sup>20</sup>

Adapun pengertian “nahi munkar” adalah mengharamkan segala bentuk kekejian, sedangkan “amar ma'ruf” adalah menghalalkan semua yang baik, karena itu mengharamkan yang baik termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah. Perintah untuk melaksanakan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar.<sup>21</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُخَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abi Sa'id Al-Khudri RA bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Barang siapa di antara kalian melihat sesuatu kemungkaran maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya, dan jika tidak mampu maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya dan jika dia tidak mampu maka hendaklah dia merubahnya

---

<sup>20</sup> Ibnu Taimiyyah, Alih Bahasa, Abu Fahmi, *Etika Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1990), hlm 15

<sup>21</sup> *Ibid. hlm. 17*

dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemah iman”. (H.R. Muslim)<sup>22</sup>

Hadits ini sebagai landasan utama dalam usaha merubah kemungkaran, oleh karena itulah para ulama memasukkannya kedalam kelompok hadits yang menjadi landasan berbagai pokok-pokok ajaran agama, bahkan dikatakan bahwa: kandungan hadits ini sebagian dari syari’ah, sebab syari’ah ini terdiri dari dua perkara, yaitu perkara yang ma’ruf maka wajib dilaksanakan atau perkara yang mungkar maka wajib dicegah. Hadits ini juga menjelaskan tentang tingkatan dalam beramar ma’ruf nahi mungkar, yaitu mengingkari kemungkaran dengan tangan dan lisan dan hal ini wajib dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kekuatan dengan syarat tidak mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Tingkatan ketiga adalah dengan hati, maka hal ini menuntut bagi seseorang hamba untuk meninggalkan tempat yang menjadi basis kemungkaran tersebut.<sup>23</sup> Allah SWT berfirman :

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى تَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾

*Artinya: Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan*

<sup>22</sup> Shahih Muslim, *Alih Bahasa*, Kh. Adib Bisri Musthofa, (Semarang : Asyi-Syifa, 2000), hlm. 60

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 63

*mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam. (Q.S. Al-Nisa': 140)*<sup>24</sup>

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimhullah berpendapat: barang siapa didalam hatinya tidak memiliki rasa marah terhadap perkara yang dimurkai oleh Allah SWT dan Rasul nya, berupa kemungkaran yang diharamkan oleh Allah SWT, seperti kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan maka berarti didalam hatinya tidak tersimpan keimanan yang telah diwajibkan oleh Allah SWT atas dirinya. Dan dia juga berkata. Dan seandainya seluruh tuntunan agama ini pada semua sisinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, maka perkara yang diperintahkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW adalah termasuk dalam amar ma'ruf dan larangan yang turunkan oleh Allah melalui Rasul-nya termasuk dalam nahi mungkar. jika suatu kemungkaran yang telah tersebar tidak segera dirubah maka hal itu adalah gendrang peringatan dan akan datangnya keburukan dan kebinasaan umat ini.<sup>25</sup> Allah SWT berfirman.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَصُرُّكُمْ مِّنْ ضَلٍّ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ  
مَرَجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu (karena) orang yang sesat itu akan member mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk, hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, kemudian dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah: 105)<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2006), hlm. 80

<sup>25</sup> *Ibid. hlm. 81*

<sup>26</sup> *Ibid. hlm. 99*



Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Seseorang atau apabila masyarakat melihat orang yang telah berlaku zalim namun dia atau mereka tidak mencegahnya maka sungguh sebentar lagi Allah menurunkan siksa untuk membinasakan mereka semua”.<sup>27</sup> Allah SWT menjelaskan bahwa meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar bisa menyebabkan kemurkaan dan laknat Allah SWT. Allah SWT berfirman:

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ  
ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ  
مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾

Artinya: Telah dila'nati orang-orang kafir dan Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam, yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. (Q.S. Al-Maidah 78-79)<sup>28</sup>

Syarat Amar dan nahi

- a. Amal seorang tidak dikatakan saleh jika dilakukan tanpa ilmu dan pemahaman, seperti yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz ra. “siapa yang mengabdikan kepada Allah tanpa ilmu maka kerusakannya akan lebih banyak dari pada kebaikan.

<sup>27</sup> Ibid. hlm. 101

<sup>28</sup> Ibid, Departemen Agama RI, hlm. 94

- b. Yang termasuk perbuatan baik adalah melakukan amar dan nahi berdasarkan jalan yang lurus yang merupakan jalan terdekat untuk menuju titik sasaran, shiraatal mustaqiem menuju rida Allah.
- c. Amal harus dilakukan dengan lemah lembut, sebagaimana di pesankan oleh rasulullah saw. Tidak ada kelemahan lembutan dalam sesuatu kecuali mengindahkannya dan tidak ada kekerasan dalam sesuatu kecuali menodainya, (Hr Muslim dan Ibnu Maja) dan dalam hadits lain dikatakan sesungguhnya Allah itu lemah lembut ia mencitai kelemahan lembutan dalam segala hal dan ia akan memberikan kepada yang tidak ia berikan pada kekerasan. (Hr Bukhari).
- d. Seorang muslim haruslah penyantun dan sabar menerima cobaan, karena setiap mukmin tidak terlepas dari cobaan, jika tidak bisa berlaku demikian maka diawatirkan kamafsadatan yang timbul lebih besar dari pada kemaslahatannya.<sup>29</sup>

## 2. Tinjauan Tentang Lembaga Swadaya Masyarakat

### a. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat

Istilah LSM didefinisikan secara tegas dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri (*Inmendagri*) No.8/1990, yang ditunjukkan kepada gubernur di seluruh Indonesia tentang pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. Lampiran II dari *Inmendagri* menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi/lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta

---

<sup>29</sup> *Ibid*, Ibnu Taimiyyah, hlm. 35

bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.<sup>30</sup>

Lembaga Swadaya Masyarakat dapat diartikan organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan minat yang besar bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.<sup>31</sup>

Perlu diperhatikan bahwa lembaga swadaya masyarakat juga merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan memperoleh keuntungan. Jadi pembentukan LSM ini berdasarkan asas sukarela tanpa adanya harapan untuk memperoleh laba yang besar. Selain berdasarkan sukarela, lembaga swadaya masyarakat juga berdiri di atas Pancasila.<sup>32</sup> Hal ini tentunya karena lembaga swadaya masyarakat hidup dan berkembang di Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila. Tentunya prinsip-prinsip dalam Pancasila ini senantiasa diterapkan dalam kegiatan LSM dalam masyarakat.

---

<sup>30</sup> Arbi Sanit, *Swadaya Politik Masyarakat*, (Jakarta : CV.Rajawali, 1985), hlm.77

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 72

<sup>32</sup> Budi Winarno, *lembaga swadaya masyarakat*, (Yogyakarta : Media Presindo, 2002), hlm. 102

Dikalangan masyarakat organisasi LSM telah tumbuh dan berkembang sebagai tempat berhimpunnya anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela menyatakan dirinya atau dinyatakan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat. Istilah LSM pertama kali dikenal dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan Lingkungan Hidup dan bergerak dalam hal-hal yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup.<sup>33</sup>

Kemudian dalam perkembangannya Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut mempunyai lingkup kegiatan yang tidak terbatas pada lingkungan hidup saja, melainkan mencakup bidang lain sesuai dengan yang diminati untuk tujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan dan keleluasaan berpartisipasi dan pengembangannya disatu pihak dan untuk kepentingan masyarakat dan negara di lain pihak memerlukan iklim yang kondusif untuk dapat mendorong kegairahan, kreativitas dan dinamika masyarakat di segala bidang, agar Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengembangkan dirinya secara swadaya dan sukarela.<sup>34</sup> Oleh karena itu Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai Mitra Pemerintah.

Lembaga Swadaya Masyarakat yang biasa disingkat menjadi LSM disebut juga di Indonesia sebagai Organisasi Non-pemerintah (*Ornop*). Secara Internasional lembaga ini disebut sebagai *Non-Government*

---

<sup>33</sup> Zaim Saidi, *LSM dan Kebangkitan Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 10

<sup>34</sup> Subayono, *organisasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hal 101



*Organization(NGO)*. Laporan PBB tahun 1998 menyatakan terdapat 29.000 NGO internasional yang kebanyakan dibentuk sejak 30 tahun terakhir. Keberadaan LSM memiliki sejarah dan latar belakang sendiri sejalan dengan bentuk dari lembaga.<sup>35</sup>

#### **b. Sejarah Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia**

Dalam sejarah perkembangannya di Indonesia istilah LSM didefinisikan secara tegas dalam Instruksi Menteri dalam Negeri No. 08 Tahun 1990 yang menyebut bahwa LSM adalah organisasi/lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat secara bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Bentuk kerjasama antara LSM dalam bidang kegiatan atau minat tertentu, misalnya :

1. Sekretariat Bina Desa (SBD), berdiri 1974, merupakan forum dari LSM yang bekerja di kawasan pedesaan.
2. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) berdiri 1976, merupakan wadah kebersamaan LSM yang memusatkan perhatian pada upaya pelestarian lingkungan.
3. Forum Indonesia untuk Keswadayaan Penduduk (FISKA), berdiri 1983, merupakan forum LSM yang bergerak dibidang kependudukan.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, Budi Winarno, hlm. 109

4. Forum Kerjasama Pengembangan Koperasi (FORMASI), berdiri 1986, merupakan forum LSM yang bekerja mengembangkan koperasi.
5. Forum Pengembangan Keswadayaan (Participatory Development Forum – PDF), berdiri 1991, merupakan peningkatan dari forum kerjasama LSM-PBB (NGO-UN Cooperation Forum) yang didirikan pada 1988. PDF menggabungkan berbagai LSM berinteraksi dengan pemerintah, dunia usaha dan badan-badan Internasional dalam suatu forum untuk mengembangkan peran serta berbagai actor dalam pembangunan.<sup>36</sup>

### 3. Fungsi tujuan dan Peran Lembaga Swadaya Masyarakat

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Organisasi kemasyarakatan adalah, “Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Organisasi kemasyarakatan hanya memiliki satu asas yaitu Pancasila, dan tujuannya ditetapkan oleh masing-masing Organisasi sesuai dengan sifat kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945”.<sup>37</sup>

Pasal 6 Undang-undang No.7 Tahun 2013 di sebutkan bahwa, Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, organisasi kemasyarakatan

---

<sup>36</sup> Dewam Raharjdjo, *Masyarakat Sipil dan LSM*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm 18

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, *Tentang Organisasi Kemasyarakatan*

berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis. Maka dengan adanya sifat kekhususan yang menentukan tujuan dan menjalankan fungsinya, lahirlah lembaga swadaya masyarakat yang merupakan bagian dari organisasi kemasyarakatan. Pembinaan lembaga swadaya masyarakat dilakukan oleh Menteri dalam Negeri dengan Instruksi Menteri dalam Negeri No.8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.<sup>38</sup>

#### **a. Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat**

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan dapat mencapai tujuannya dengan baik jika mampu menjalankan fungsinya dengan baik, berikut ini adalah beberapa fungsi lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia:

1. Sebagai wadah organisasi yang menampung, memproses, mengelolakan melaksanakan semua aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan terutama pada bagian ini yang kerap kali tidak diperhatikan oleh pemerintahan.
2. Senantiasa ikut menumbuhkan dan mengembangkan jiwa dan semangat serta memberdayakan masyarakat dalam bidang pembangunan, ini merupakan salah satu fungsi utama dari pembentukan lembaga swadaya masyarakat itu sendiri.
3. Ikut melaksanakan, mengawasi, memotivasi dan merancang proses dan hasil pembangunan secara berkesinambungan tidak hanya pada saat itu

---

<sup>38</sup> Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1990, *Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat*

juga. Dalam hal ini LSM harus memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan.

4. LSM juga harus aktif dalam memelihara dan menciptakan suasana yang kondusif didalam kehidupan masyarakat bukan sebaliknya justru membuat keadaan menjadi semakin kacau dengan adanya isu-isu palsu yang meresahkan masyarakat.
5. Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai wadah penyalur aspirasi atas hak dan kewajiban warga negara dan kegiatan dari masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Lembaga Swadaya Masyarakat.
6. Lembaga Swadaya Masyarakat juga harus ikut menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh anggotanya sehingga dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dalam hal ini sangatlah penting karena jika anggota dalam lembaga swadaya masyarakat tidak memiliki potensi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan akan menjadikan LSM seperti halnya mayat hidup, yang ada keberadaannya namun tidak memiliki nyawa di dalamnya.
7. Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai wadah yang ikut aktif dalam perannya mensukseskan pembangunan bangsa dan negara. Serta dalam hal ini ikut menjaga kedaulatan negara serta menjaga ketertiban sosial.
8. Sebagai salah satu cara bagi masyarakat untuk memberikan aspirasinya, kemudian aspirasi ini ditampung oleh lembaga swadaya masyarakat sesuai dengan tujuan LSM itu sendiri dan kemudian akan disalurkan



kepada lembaga politik yang bersangkutan guna mencapai keseimbangan komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintahan seperti politik luar negeri Indonesia.<sup>39</sup>

#### **b. Tujuan Lembaga Swadaya Masyarakat**

Masing-masing lembaga swadaya masyarakat mempunyai tujuan yang berbeda-beda tergantung dengan bidang yang dijalaninya. Jadi untuk melihat apakah lembaga swadaya masyarakat tersebut sudah bisa menjalankan fungsinya dengan baik atau tidak harus dilihat bagi tujuannya dari adanya LSM tersebut. Saat ini di Indonesia ada beberapa bidang yang dinaungi oleh LSM, contohnya dapat dilihat berikut ini:

1. Lembaga swadaya masyarakat perlindungan anak dan perempuan, LSM ini bertujuan untuk melindungi anak dan kaum perempuan yang mengalami penganiayaan dan kekerasan serta bentuk tindakan pidana lainnya. Hal ini sangat penting karena wanita di Indonesia masih banyak terampas haknya sehingga kemungkinan mereka melaporkan ke polisi mungkin masih sedikit. Jadi LSM ini akan terus member penyuluhan kepada masyarakat untuk melaporkan segala jenis tindakan pidana kepada LSM tersebut dan LSM tersebut akan menyampaikan kepada pihak yang berwenang.
2. Lembaga swadaya masyarakat perlindungan TKI dan TKW, hak-hak para pekerja migrant memang kerap kali diabaikan oleh pemerintah oleh karena itu saat ini bermunculan LSM yang bertujuan untuk melindungi

---

<sup>39</sup> Abdullah Sundoko, *lembaga swadaya masyarakat*, (Semarang : Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 54

para TKI dan TKW yang mendapatkan perlakuan tidak pantas di luar negeri terutama bagi mereka yang menjadi pekerja buruh migrant.

3. Lembaga swadaya masyarakat peduli lingkungan alam, LSM ini bertujuan untuk mengawasi dan ikut serta dalam perlindungan lingkungan alam. Biasanya terdapat LSM masing-masing lebih khusus ranahnya seperti LSM perlindungan hutan, LSM perlindungan flora dan fauna yang terancam punah, LSM pencinta laut dan segala yang ada di dalamnya, LSM dengan tujuan ini juga sudah kian marak perkembangannya sering dengan rusaknya alam dan tidak adanya perhatian pemerintah secara khusus.
4. Lembaga sawadaya masyarakat perlindungan terhadap saksi dan korban, LSM ini bertujuan untuk melindungi mereka yang menjadi korban para saksi pada sebuah kasus baik tindak pidana maupun perdata. Hal ini dilakukan karena ada banyak korban dan saksi yang tidak melaporkan tindak kejahatan dikarenakan mereka diancam dan tidak bisa bebas dalam melapor yang menjadi penyebab tawuran antar korban atau saksi. Nah LSM ini akan memberikan perlindungan kepada mereka sehingga para korban dan saksi ini tidak perlu takut saat melaporkan sebuah tindakan kejahatan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Jildan hasan, *organisasi lembaga swadaya masyarakat*, (Jakarta : gramedia, 2004), hlm. 67

### c. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat

LSM mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia, karena lembaga tersebut mempunyai kedekatan yang lebih terhadap masyarakat sekitarnya. Peran LSM tersebut antara lain:

1. Memberikan informasi satu arah misalnya lewat media masa, poster, pembagian dokumen lewat pemda, dan sebagainya.
2. Memberikan pertukaran informasi dua arah yang melibatkan masyarakat: kunjungan kedesa/rumah dan Tanya jawab, pertemuan khusus dengan peserta-peserta yang diundang, pengumpulan pendapat, dan pengetahuan dengan metode belajar bersama, bertindak bersama.
3. Masyarakat mendapatkan media sebagai penyalur inspirasinya yang dapat diperjuangkan sekuat tenaga dengan dukungan LSM dan pihak-pihak terkait.
4. Sedang bidang kegiatan LSM saat ini meliputi kegiatan yang cukup luas, meliputi bidang-bidang lingkup hidup, konsumen, bantuan hukum, pendidikan dan latihan, perhutanan sosial, pengairan, koperasi, penerbitan, kesehatan dan keluarga berencana, dan pengembangan pedesaan dan pertanian dan lain-lain.<sup>41</sup>

Dengan memahami informasi-informasi yang berpengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan kelompok swadaya, dapatlah kemudian disusun program-program pengembangan yang merupakan peran LSM

---

<sup>41</sup> *Ibid*, Abdullah Sundoko, hlm. 57

untuk mendorong keberhasilan penyelenggaraan kelompok swadaya.<sup>42</sup>

Berdasarkan pengalaman ada 5 (lima) program pengembangan yang dapat disusun untuk mendorong keberhasilan kelompok swadaya yang disalurkan melalui tenaga-tenaga pendamping kelompok, yaitu:

- a. Program pengembangan sumber daya manusia, meliputi berbagai kegiatan pendidikan dan latihan baik pendidikan dan latihan untuk anggota maupun untuk pengurus yang mencakup pendidikan dan latihan tentang keterampilan mengelola kelembagaan kelompok, keterampilan teknik produksi, maupun keterampilan mengelola usaha.
- b. Program pengembangan kelembagaan kelompok, dengan membantu menyusun peraturan rumah tangga, mekanisme organisasi, kepengurusan, administrasi dan lain sebagainya.
- c. Program pemupukan modal swadaya, dengan membangun sistem tabungan dan kredit anggota serta menghubungkan kelompok swadaya tersebut dengan lembaga-lembaga keuangan setempat untuk mendapatkan manfaat bagi penumpukan modal lebih lanjut.
- d. Program pengembangan usaha, baik produksi maupun pemasaran, dengan berbagai kegiatan studi kelayakan, informasi pasar, organisasi produksi dan pemasaran dan lain-lain.
- e. Program penyediaan informasi tepat guna, sesuai dengan kebutuhan kelompok swadaya dengan berbagai tingkat perkembangannya, informasi ini dapat berupa exposure program, penerbitan buku-buku

---

<sup>42</sup> *Ibid*, Abdullah Sundoko, hlm. 62

maupun majalah-majalah yang dapat memberikan masukan-masukan yang mendorong inspirasi ke arah inovasi usaha lebih lanjut.<sup>43</sup>

Membawakan peran nyata dalam masyarakat untuk menumbuhkan keserasan pembangunan, baik dalam pertanian dan pedesaan, dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, keberadaan LSM yang banyak itu akan berdampak positif,<sup>44</sup> antara lain:

a. Dampak dalam Aspek Sosial

Melalui proses pendidikan yang diberikan kepada kelompok swadaya diharapkan wawasan pemikiran mereka pun semakin meningkat, sehingga mempunyai kemampuan untuk memikirkan banyak alternative dalam usaha mencakupi kebutuhan hidup, peningkatan pendidikan yang terjadi pada kelompok swadaya dapat melalui dua jalur, yaitu secara langsung dan tidak langsung, peningkatan pendidikan secara langsung terjadi apabila kelompok swadaya mendapatkan penyuluhan, pelatihan, konsultasi, dan sebagainya.<sup>45</sup>

Sedangkan, peningkatan pendidikan secara tidak langsung terjadi sejalan dengan terintegrasinya orang-orang desa dalam suatu kelompok swadaya. Melalui kelompok tersebut setiap anggota berintegrasi menumbuhkan kesadaran akan posisi mereka. Penyadaran diri merupakan langkah awal untuk memulai memikirkan alternatif-alternatif baru yang mungkin dapat ditempuh dalam usaha memperbaiki tingkat

---

<sup>43</sup> Ridwan, *demokrasi*, (Jakarta : Kencana Prenada, 2001), hlm. 15

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 39

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 41



kehidupan. Di samping itu, dengan adanya kesadaran akan posisi yang dimilikinya menyebabkan kelompok swadaya berani memperjuangkan hak-hak mereka mengaktualkan potensi yang ada pada mereka serta mengikis kelemahan-kelemahan yang ada.<sup>46</sup>

Melalui aktifitas yang dilakukan, intervensi pembinaan membantu pemecahan permasalahan-permasalahan sosial yang terdapat dalam kelompok masyarakat. Melalui sistem pendekatan terlibat langsung dengan kelompok, pola pembinaan bersama kelompok yang bersangkutan mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi secara mendalam. Akibatnya penanganan terhadap masalah yang dihadapi kelompok dapat dilakukan secara tepat sasaran dan lebih tuntas. Disamping itu, berkat interaksi yang intens antara para Pembina dengan kelompok, sementara para pembina telah dilatih secara khusus dan selalu diberikan masukan untuk meningkatkan dengan berbagai pelayanan setempat, maka terjadilah proses transformasi sosial.<sup>47</sup>

#### b. Dampak dalam Aspek Ekonomi

Dalam bidang ekonomi intervensi pembinaan akan mampu mendorong masyarakat kecil untuk melakukan penumpukan modal. Selama ini faktor yang selalu dikemukakan tentang penyebab tidak berhasilnya masyarakat miskin dalam memperbaiki kehidupan adalah karena mereka tidak mampu untuk melakukan penumpukan modal yang

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 43

<sup>47</sup> M. Dawan Rahardjo, *Tiga Dasar Teori LSM*, (Jakarta : Harian Umum Republika, 1994), hlm. 4

dapat dipergunakan sebagai pengembangan usaha. Dengan sistem kelompok, maka modal yang kecil dari setiap warga dapat berkembang menjadi besar, sehingga dapat dipergunakan sebagai modal usaha, disamping itu dengan adanya modal yang terkumpul dapat mengundang partisipasi dana lebih besar dari pihak ketiga. Saat ini terbuka kemungkinan Bank melayani kelompok-kelompok swadaya yang berstatus non formal.<sup>48</sup>

Kemampuan permodalan kelompok yang semakin bertambah memberikan peluang semakin besar untuk mengembangkan usaha produktif. Usaha produktif yang dilakukan kelompok menyebabkan terbukanya kesempatan kerja atau usaha bagi kelompok itu sendiri maupun masyarakat luas, hal ini berdasarkan kenyataan bahwa satu usaha produktif yang dilakukan, misalnya peternakan atau industri kecil, tentu memerlukan usaha lain untuk menunjang keberhasilan usaha produktif pokok. Usaha-usaha lain dari usaha pokok inilah yang membuka kesempatan kerja baru (diversifikasi) dan peningkatan pendapatan warga masyarakat.<sup>49</sup>

c. Dampak dalam Aspek Kemasyarakatan

Proses interaksi didalam kelompok dengan sesama anggota maupun dengan berbagai sumber pelayanan dan pembinaan semakin meningkatkan wawasan berbangsa dan bernegara.

---

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm. 5

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm. 6

Adanya kelompok sebagai wadah mengaktualisasikan diri warga masyarakat pedesaan menyebabkan mereka merasa terlibat dalam proses pembangunan. Keterlibatan mereka dalam pembangunan tidak lagi pasif, tetapi menjadi aktif karena telah turut berusaha dalam berbagai kegiatan produktif yang memberikan andil. Kesadaran untuk berperan serta dalam kegiatan kelompok tersebut mempunyai dampak lebih lanjut, yaitu adanya kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam program-program pembangunan yang ditawarkan pemerintah.<sup>50</sup>

Proses pengembangan kemandirian dan kesadaran berpartisipasi telah menjabatani kesenjangan sosial di tingkat lokal. Dengan menyempitnya kesenjangan sosial berarti stabilitasi sosial politik pun dapat terus berlanjut. Sementara itu pengalaman lapangan LSM yang merupakan hasil kaji tindak (*participatory action research*) dapat merupakan rekomendasi bagi perbaikan dan peningkatan dari pedekatan pembangunan.<sup>51</sup>

#### 4. Tipe-tipe Lembaga Swadaya Masyarakat

Sebagaimana dikutip oleh sugiyanto, menerangkan bahwa tipe-tipe lembaga swadaya masyarakat adalah sebagai berikut:

##### a. Dilihat dari sudut perkembangannya

1. Crescive instituison (lembaga paling primer) Adalah suatu tipe lembaga swadaya masyarakat yang tumbuh tidak sengaja dan tumbuhnya berasal

---

<sup>50</sup> Siagian Sondang P, *Teori Pengembangan Organisasi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), hlm. 40

<sup>51</sup> Mirriam Budiadjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 55

dari adat istiadat. Contohnya lembaga swadaya masyarakat yang menangani masalah perkawinan dan lain-lain.

2. Enacted institusion (lembaga yang dibentuk dengan sengaja) Adalah suatu lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk dengan sengaja oleh masyarakat dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang bersangkutan. Contoh lembaga swadaya masyarakat yang menangani masalah lembaga pendidikan, sumber daya manusia dan lain-lain.

**b. Dilihat dari sudut nilai**

1. Basic *institusion* Adalah suatu tipe lembaga swadaya masyarakat yang paling penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib (norma) yang ada dalam masyarakat. Sebagai contoh adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang keluarga dan masalah agama.
2. *Subsidy institusion* Adalah suatu lembaga swadaya masyarakat yang dianggap kurang penting oleh sekelompok masyarakat tertentu, dikarenakan lembaga ini mendapatkan subsidy dari institusi tertentu (baik pemerintah maupun lembaga donor lainnya) sehingga independensinya tidak terjaga. Contoh lembaga jenis ini adalah lembaga swadaya masyarakat yang menangani masalah olah raga, taman-taman rekreasi dan lain-lain.

**c. Dilihat dari sudut penerimaan oleh masyarakat**

1. Aproviated *social institusion* Adalah suatu tipe lembaga swadaya masyarakat yang diterima oleh masyarakat karena lembaga tersebut dirasa member manfaat dan keuntungan serta dibutuhkan. Sebagai contoh

adalah lembaga swadaya yang bergerak dibidang agama, pendidikan, perdagangan.

2. *Unproved un sanctioned institusion* Adalah suatu lembaga swadaya masyarakat yang ditolak oleh masyarakat secara umum dikarenakan lembaga tersebut dianggap meresahkan dan tidak menampung aspirasi masyarakat bahkan merugikan masyarakat secara umum. Sebagai contoh lembaga swadaya yang menangani masalah anak jalanan, persatuan geng dan lain-lain.<sup>52</sup>

#### d. Bentuk Organisasi Dari Lembaga Swadaya Masyarakat

Secara umum bentuk organisasi dari LSM dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Lembaga mitra pemerintah, lembaga ini bekerja sama dengan pemerintah dalam menjalankan program-program pemerintah. Dana yang digunakan bisa berasal dari pemerintah atau dari lembaga donor lainnya. Ibarat simbiosis mutualisme, peran pemerintah dan LSM disini saling bantu-membantu dan melengkapi satu sama lain. LSM melakukan identifikasi lapangan yang riil terhadap kebijakan yang akan dilakukan pemerintah. Sedangkan pemerintah atau lembaga donor lainnya memberikan kucuran dan teknis pelaksanaan pada LSM tersebut. Sehingga ada *balancing policy* antara LSM dan pemerintah. Contoh LSM seperti ini adalah lembaga pangan independent (LPI) yang biasa menyalurkan pupuk dan benih kepada petani Indonesia.

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1987), hlm. 17



2. Lembaga donor yang mengumpulkan dana untuk dapat disalurkan kepada lembaga dan masyarakat yang membutuhkan. Dalam fungsinya sebagai lembaga donor, LSM dimungkinkan untuk diberi kepercayaan oleh masyarakat mengemban tugas tertentu. Seperti tempat penggalangan dana untuk korban bencana alam, penggalangan dana dan sembako ketika hari raya keagamaan dan lain-lain. Dalam fungsi ini mungkin saja LSM melakukan kesalahan-kesalahan ataupun penyelewengan. Disinilah dituntut tanggungjawab dan juga transparansi LSM dalam melakukan tugasnya. Contoh LSM yang berbentuk seperti ini di Indonesia seperti, Lembaga pundi amal, Tali kasih di Indonesia dan lain-lainnya.
3. Lembaga profesional yang bekerja berdasarkan satu isu berkaitan dengan profesi tertentu, misalnya: Kesehatan, ekonomi, HAM, kriminalitas dan lainnya. Lembaga ini punya andil yang besar dalam mengusut dan juga menginvestigasi kasus-kasus yang berkaitan tentang suatu permasalahan. Contohnya, ketika kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, dibentuk sebuah LSM yang bertugas mencari fakta tentang kasus tersebut. Beberapa waktu kemudian LSM ini diubah fungsinya oleh pemerintah sehingga menjadi sebuah organisasi independen yang biayanya ditanggung pemerintah. Contoh lainnya adalah LSM peduli rakyat Lapindo (PRL) yang dengan suka rela membantu korban bencana lumpur lapindo di Sidoarjo, dengan menggalang dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat korban bencana.

4. Lembaga oposisi yang menjadi oposisi pemerintahan dan mengkritik kebijakan pemerintah dan menjalankan program berdasarkan kritik tersebut atau alternatif lainnya. LSM semacam ini bisa kita ambil contoh seperti *ICW (Indonesian Corruption watch)* yang biasa menginvestigasi dan mengkritik kasus-kasus korupsi yang dilakukan baik oleh birokrat maupun anggota legislative (DPR).<sup>53</sup>

Karena LSM adalah organisasi/lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warga negara republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya, maka secara tidak langsung pihak-pihak yang terlibat antara lain:

- a. Warga atau masyarakat sekitar yang terlibat
- b. Sukarelawan yang menjadi anggota LSM
- c. Pemerintah daerah sekitar.<sup>54</sup>

Selain pihak diatas, LSM juga menjalin kerjasama tergantung dari jenis LSM maupun pihak yang diikutsertakan dalam kegiatan tersebut. Bisa dari pihak tersebut antara lain: Petugas keamanan, lembaga atau instansi yang kiranya terlibat, dukungan dari partai politik dan lain-lain. Untuk mewujudkannya diperlukan konsistensi dalam sebuah anggotanya, yang mana

---

<sup>53</sup> Johan, *Organisasi Dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, (Yogyakarta : Media Presindo, 2002), hlm. 23-24

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 58

itu merupakan komponen acuan penyelenggaraan. Menurut Drs. Bambang Ismawan, MS komponen tersebut yaitu:

1. Kelompok swadaya perlu berorientasi pada upaya peningkatan pendapatan. Dalam rangka ini perlu diupayakan terus-menerus pemahaman dan peningkatan penyelenggaraan ekonomi rumah tangga yang efektif, pemupukan modal swadaya serta pengembangan usaha-usaha produksi dan pemasaran.
2. Kelompok swadaya perlu bersikap terbuka, yaitu terbuka terhadap gagasan-gagasan baru serta terbuka terhadap kerja sama baru untuk mencapai tingkat skala usaha yang lebih besar.
3. Kelompok swadaya perlu diselenggarakan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi yang tinggi diantara anggota. Dalam rangka ini perlu didorong agar pertemuan anggota dapat diselenggarakan secara teratur satu bulan atau satu minggu sekali, pengurus dipilih dari antara anggota, diselenggarakan secara teratur program pendidikan kader, administrasi yang tertib dan terbuka, serta perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kegiatan secara partisipatif.<sup>55</sup>

Untuk mencapai ke4mantapan dalam pengeterapan kerangka acuan tersebut, diperlukan proses pengentalan atau internalisasi didalam kelompok swadaya dengan tahap-tahap: Penggalian motivasi, konsolidasi organisasi, penumbuhan dan pengembangan usaha, dan pengembangan kemandirian

---

<sup>55</sup> *Ibid, hlm. 59*

kelompok. Sebuah organisasi akan dikatakan menjadi lembaga swadaya masyarakat (LSM) jika memenuhi cirri-ciri sebagai berikut ini :

- a. Bukan dari bagian dari pemerintah dan birokrasi baik pemerintah pusat, provinsi, kota hingga pemerintah desa (baca struktur organisasi pemerintah desa).
- b. Tujuan didirikan organisasi tersebut tidaklah mencari keuntungan.
- c. Memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk kepentingan masyarakat umum bukan hanya untuk kepentingan beberapa golongan saja.<sup>56</sup>

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) merupakan salah satu bentuk organisasi kemasyarakatan. Lembaga swadaya masyarakat lahir karena konsekuensi sistem politik yang dianut oleh bangsa kita, dimana tujuan yang harus dicapainya di dasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Indonesia menganut sistem politik demokrasi Pancasila yakni sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis.<sup>57</sup>

Ciri khas dari pemerintahan demokrasi salah satunya adalah perlindungan terhadap HAM yang diantaranya adalah kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945. Perkembangan bangsa Indonesia yang menganut sistem demokrasi memberikan ruang yang cukup baik bagi perkembangan kemerdekaan berpendapat sebagai bentuk penyaluran aspirasi

---

<sup>56</sup> Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Fungsi Dan Struktur*, (Surabaya : SIC, 2002), hlm. 98

<sup>57</sup> *Ibid*, Dawam Rahardjo, hlm. 41

rakyat. Untuk itu dibutuhkan sebuah wadah penyalur aspirasi rakyat dalam sebuah organisasi kemasyarakatan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan, maka pemerintah berupaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencapai tujuan nasional.<sup>58</sup>

## 5. Pembangunan

### a. Pengertian Pembangunan

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya yang terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu Negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Setiap individu (society) atau Negara akan selalu bekerja keras untuk melakukan pembangunan. Demi kelangsungan hidupnya untuk masa ini dan masa yang akan datang yang lebih baik. Yang merupakan proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat.<sup>59</sup>

Negara selalu mempunyai program pembangunan. Dengan tujuan semua orang turut mengambil bagian. Sedangkan ekonomi adalah suatu komponen esensial dari pembangunan itu sendiri. Dalam pengertian yang paling mendasar bahwa pembangunan itu haruslah mencakup masalah-masalah materi dan financial dalam rangka kehidupan. Pembangunan

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985, *Tentang Organisasi kemasyarakatan*

<sup>59</sup> Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta : Cides, 1996), hlm. 145



seharusnya diselidiki sebagai suatu proses multi dimensional yang melibatkan reorganisasi dari semua system ekonomi dan social.<sup>60</sup>

## **b. Rencana Pembangunan**

Perencanaan pembangunan adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang menengah dan tahunan. Yang dilaksanakan oleh unsure penyelenggara Negara dan masyarakat baik tingkat pusat maupun daerah. Rencana pembangunan tahunan memuat prioritas pembangunan nasional. Rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh.<sup>61</sup>

Rencana pembangunan jangka panjang daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode dua puluh tahun yang diatur dalam undang-undang. Yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah disusun mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional. Rencana pembangunan jangka menengah daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk lima tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah serta memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah daerah.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Koesnandi Hardja Soemantri, *Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 61

<sup>61</sup> *Ibid*, Ginandjar Kartasasmita, hlm. 147

<sup>62</sup> *Ibid*, Ginandjar Kartasasmita, hlm. 149

### c. Tujuan Pembangunan Nasional

Tujuan pembangunan nasional adalah rangkaian upaya yang berkesinambungan dalam upaya melakukan perubahan dan perbaikan di segala bidang. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Pembangunan nasional adalah pembangunan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dan sasarannya meliputi seluruh bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan sebagainya.<sup>63</sup>

Pembangunan baik fisik maupun non fisik yang dimiliki oleh masyarakat melalui beberapa gabungan proses sosial, ekonomi, dan institusional, mencakup usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Sasaran pembangunan dalam masyarakat adalah :

1. Meningkatkan persediaan dan memperluas atau pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bias hidup, seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan.
2. Mengangkat taraf hidup termasuk mempertambah dan mempertinggi penyediaan lapangan kerja yang memadai. Pendidikan yang lebih baik dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan manusiawi. Dan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materiil juga untuk mengangkat kesadaran akan harga diri baik secara individu maupun nasional.

---

<sup>63</sup> Bachtiar Effendi, *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*, (Yogyakarta : Kurnia Alam Semesta, 2002), hlm. 31

3. Memperluas jangkauan ekonomi bagi semua seluruh masyarakat dengan cara membebaskan mereka dari sikap-sikap budak ketergantungan. Tidakhanya hubungannya dengan orang lain dan juga negara-negara lain tapi dari sumber kebodohan dan penderitaan manusia.<sup>64</sup>

Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan disebutkan organisasi kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai fungsi menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan mewujudkan tujuan negara. Berkaitan dengan hal tersebut tujuan negara adalah memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Artinya bahwa masyarakat berhak tahu anggaran pendapatan yang digunakan untuk pembangunan dalam rangka untuk meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat banyak atau rakyat banyak.<sup>65</sup>

## B. Tinjauan Pustaka

Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mengungkap tindak pidana korupsi, dilakukan dengan menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama memberantas tindak pidana korupsi, karena korupsi merupakan permasalahan yang sangat dekat dengan masyarakat dan masyarakatlah yang paling dirugikan dalam tindak pidana korupsi, oleh karena itu perlu adanya partisipasi dari masyarakat untuk memberantas korupsi ini yaitu dengan cara memberikan informasi.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Moeljarto, *Politik Pembangunan Sebuah Analisis, Konsep Arah dan Strategi*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1995) hlm. 68

<sup>65</sup> *Ibid*, Abdullah Sundoko, hlm. 55

<sup>66</sup> Erusnaldi, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Peran LSM Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi*. (Skripsi S1 Program Jinayah Siyasah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2013), h. 75.

Bentuk pengawasan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Lampung dalam mengawasi pelayanan publik di Kota Bandar Lampung, dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga pengawas external lembaga Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Lampung melakukan bentuk upaya pencegahan terjadinya maladminstrasi di kota Bandar Lampung dengan cara sosialisasi, koordinasi, kerjasama dan pengembangan jaringan. tujuan yang dilakukan Ombudsman dalam melakukan bentuk pencegahan adalah agar terciptanya pelayanan publik yang ada di kota Bandar Lampung lebih baik, bersih dan efesien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dalam pelayanan publik.<sup>67</sup>

Lembaga Swadaya Masyarakat Damar dalam upaya pemberdayaan politik perempuan antara lain sebagai pembelaan terhadap perempuan dan peningkatan mutu sumber daya manusia yang propesional sehingga memiliki kemampuan yang bisa diandalkan dalam bidang politik, menumbuhkan pemahaman dan kesadaran kritis para perempuan terhadap hak-hak dan kedudukannya di mata hukum dan publik, dan sebagai fasilitator dan motivator yang mendorong perempuan untuk dapat berperan aktif dalam perpolitikan Indonesia.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Nyimas Ayu Anggun Shintiya, *Peran Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik Di Kota Bandar Lampung*. (Skripsi S1 Program Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung 2017), h. 125.

<sup>68</sup> Nurhayati, *Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat Damar Dalam Pemberdayaan Politik Perempuan Di Bandar Lampung*. (Skripsi S1 Program Sosial Politik Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2007), h. 71.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Utama

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2006).

### B. Buku

Abdullah sundoko, *lembaga swadaya masyarakat*, (semarang : pustaka pelajar, 2001).

Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta : Sumbangsih, 1975).

Arbi sanit, *Swadaya Politik Masyarakat*, (Jakarta : CV.Rajawali, 1985).

Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Fungsi Dan Struktur*, (Surabaya : SIC, 2002).

Arsyat Soeratmo, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP STIM KPN, 2008).

Bachtiar Effendi, *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*, (Yogyakarta : Kurnia Alam Semesta, 2002).

Budi Setiyono, *Pengawasan Pemilu oleh LSM*, Suara merdeka, 20 November 2017.

Budi Winarno, *lembaga swadaya masyarakat*, (Yogyakarta : Media Presindo, 2002).

Dewam Raharjdjo, *Masyarakat Sipil dan LSM*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995).

Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta : Cides, 1996).

Ibnu Taimiyyah, Alih Bahasa, Abu Fahmi, *Etika Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1990).

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1990, *Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat*.



- Inu Kencana Syafi'i, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an*, (Jakarta: PT BumiAksara, 2004).
- Jildan hasan, *organisasi lembaga swadaya masyarakat*, (Jakarta : gramedia, 2004).
- Johan, *Organisasi Dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, (Yogyakarta : Media Presindo, 2002).
- Koesnandi Hardja Soemantri, *Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995).
- M. Dawan Rahardjo, *Tiga Dasar Teori LSM*, (Jakarta : Harian Umum Republika, 1994).
- Mirriam Budiadjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1992).
- Moeljarto, *Politik Pembangunan Sebuah Analisis, Konsep Arah dan Starategi*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1995).
- Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta : LP3ES, 1999).
- P. Joko, Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Peraktek*, (Jakarta : PT, rineka cipta, 2004).
- Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : Arkola, 2001).
- Ridwan, *demokrasi*, (Jakarta : Kencana Prenada, 2001).
- Shahih Muslim, *Alih Bahasa, Kh. Adib Bisri Musthofa*, (Semarang : Asyi-Syifa, 2000).
- Siagian Sondang P, *Teori Pengembangan Organisasi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995).
- Sjachroedin, *Demimu Lampung Padamu Bhakti untuk Indonesia* (Kalianda : PT. Haga Media Indrajaya, 2000).
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1987).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986).

Subayono, *organisasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993).

Susiadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pusat penelitian dan penerbitan LP2M, 2015).

Zaim Saidi, *LSM dan Kebangkitan Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995).

### C. Jurnal

Data Badan Pusat Statistik diakses pada tanggal 21 November 2017 dapat diunduh dari <http://www.beritasatu.com/nasional/193810-bps-maret-2014-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-capai-28-juta.html>.

Erusnaldi, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Peran LSM Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi*. (Skripsi S1 Program Jinayah Siyasah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2013).

<http://kbbi.web.id/tinjau>, diakses tanggal 20 November 2017, jam 20:00 WIB.

<http://www.gurupendidikan.co.id> di akses 20 November 2017, jam 15:00 WIB.

<http://www.trigonalmedia.com> di akses 20 November 2017, jam 15:20 WIB.

<https://islamislagic.wordpress.com/kumpulan-hadits-shahih/40-hadits-tentang-pemimpin-dan-penjelasanya/>, diakses 21 November 2017, jam 19:00 WIB.

[Lampung.tribunnews.com/2013/07/11/](http://Lampung.tribunnews.com/2013/07/11/), diakses 11 Januari 2018, jam 23:00 WIB.

Nurhayati, *Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat Damar Dalam Pemberdayaan Politik Perempuan Di Bandar Lampung*. (Skripsi S1 Program Sosial Politik Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2007).

Nyimas Ayu Anggun Shintiya, *Peran Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik Di Kota Bandar Lampung*. (Skripsi S1 Program Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung 2017).

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, *Tentang Organisasi Kemasyarakatan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985, *Tentang Organisasi kemasyarakatan*.

#### **E. Wawancara**

Adi Gunawan, Wawancara dengan Kepala Divisi Hubungan Daerah Lembaga Kompak Lampung, 10 agustus 2018.

Agung Adi Pratama, Wawancara dengan Pengawas Lembaga Kompak Lampung, 5 Agustus 2018.

Heri Irawan, Wawancara dengan Sekretaris Umum Lembaga Kompak Lampung, 7 Agustus 2018.

Lekok Dalom, Wawancara Dengan Penasehat Lembaga Kompak Lampung, 2 Agustus 2018.

Lukman Hakim, Wawancara Dengan Kepala Divisi Media dan Komunikasi Lembaga Kompak Lampung, 30 Juli 2018.

Riski Gunawan, Wawancara dengan Humas Lembaga Kompak Lampung, 13 Juli 2018.

Rusli, Wawancara dengan Kepala Divisi Hukum dan Advokasi Lembaga Kompak Lampung, 20 Juli 2018.

Sobki Roni, Wawancara dengan Ketua Umum Lembaga Kompak Lampung, 25 Juli 2018.